PEKERJA ANAK DALAM INDUSTRI HIBURAN DITINJAU BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Tambok Julius¹, Eka Putri Oktaviani², Khalisa Putri Khalila³, Lina Husnul Khairiyyah⁴, Satino⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

¹2210611146@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2210611424@mahasiswa.upnvj.ac.id,

³2210611433@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴2210611440@mahasiswa.upnvj.ac.id

***ABSTRACT;** Child labor is a form of violation of children's human rights because it ignores the rights that they should get, such as the right to education, play, access to health services and others. This situation makes child labor a group that requires special protection and serious attention from parents, families, communities, stakeholders, and the government as a policy maker. Working children are not only victims of violations of their rights, but work also has a negative impact on their physical and psychological health. Working children are not only victims of rights violations, but work also negatively impacts their physical and psychological well-being. Working children are not only victims of rights violations, but work also negatively impacts their physical and psychological well-being. This paper aims to: 1) find out the legal arrangements regarding child labor based on the applicable laws; 2) find out the implementation and role of related institutions in seeking legal protection for child laborers in the entertainment industry. The method used in this paper is the normative juridical method with the collection of secondary data sources and literature study techniques. In this paper, it is found that the factors causing child labor include: 1) economic conditions; 2) education level; 3) family conditions. Not only that, the efforts made by the central government in dealing with child labor are published in the Presidential Decree (Keppres), including: 1) Presidential Decree No. 12 of 2001; 2) Presidential Decree No. 59 of 2002; 3) Presidential Decree No. 87 of 2002.*

***Keywords:** Children, Entertainment Industry, Labor.*

ABSTRAK; Salah satu bentuk pelanggaran HAM terhadap anak adalah pekerja anak. Karena dengan mempekerjakan anak berarti sama dengan mengabaikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, seperti hak untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, bermain, dan sebagainya. Kondisi ini menjadikan pekerja anak sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus dan perhatian serius dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemerintah sebagai pengambil kewenangan. Anak yang bekerja tidak hanya menjadi korban pelanggaran hak-hak mereka, tetapi pekerjaan juga berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan psikologis mereka. Anak yang bekerja tidak hanya menjadi korban pelanggaran hak, tetapi pekerjaan juga berdampak negatif terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis

mereka. Pekerja anak tidak hanya melanggar hak-hak anak, namun juga berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Penulisan ini bertujuan untuk: 1) memahami pengaturan hukum tentang pekerja anak berdasarkan dengan Undang-undang yang berlaku; 2) mengetahui implementasi dan peran lembaga terkait dalam mengupayakan perlindungan hukum bagi pekerja anak di industri hiburan. Metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pengumpulan sumber data sekunder dan primer, serta teknik studi pustaka. Dalam penulisan ini, ditemukan bahwa faktor penyebab terjadinya pekerja anak dibawah umur, antara lain: 1) kondisi ekonomi; 2) tingkat pendidikan; 3) kondisi keluarga. Tidak hanya itu, upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam menangani pekerja anak di bawah umur terbit dalam Keputusan Presiden (Keppres), diantaranya: 1) Keppres No. 12 Tahun 2001; 2) Keppres No. 59 Tahun 2002; 3) Keppres No. 87 Tahun 2002.

Kata Kunci: Anak, Industri Hiburan, Pekerja.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia adalah negara yang mempunyai sistem hukum. Hak serta, kewajiban warga negara Indonesia dituangkan dalam Pancasila dan juga UUD 1945 yang menjadi standar bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena penerapan negara kesejahteraan di Indonesia, negara diwajibkan oleh konstitusinya guna melindungi hak asasi manusia dan juga kewajiban warga negaranya. Hal ini dicapai dengan menetapkan konstitusi hak dan kewajiban warga negara, yang berdampak pada kewajiban negara guna menghormati, mengakui, serta melindungi hak-hak rakyat negaranya, termasuk realisasi hak-hak tersebut.

Salah satu bentuk hak adalah kemampuan untuk bekerja serta, mendapatkan pekerjaan dan hak-hak lain di tempat kerja, oleh karena itu negara harus mengakui, menjunjung tinggi, serta, menjamin nya. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk bekerja dan menduduki jabatan yang sama, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tanpa memandang faktor-faktor seperti gender, suku, agama, ras, atau golongan. Perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak menggambarkan salah satu komplikasi ketenagakerjaan yang memerlukan perhatian khusus.

Anak merupakan sumber daya yang berharga bagi negara karena mereka mewakili generasi muda yang berkontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional. Anak-anak juga menandai dimulainya generasi baru dan merupakan cita-cita yang telah diperjuangkan oleh

negara untuk dicapai. Generasi muda masa kini akan menentukan arah bangsa serta negara di masa depan. Namun, tidak semua anak-anak memiliki peluang akan tumbuh dan berkembang sebagai mestinya. Salah satunya adalah praktik pekerja anak, khususnya di industri hiburan.

Industri hiburan atau Entertainment and Media (EnM) Industry merupakan organisasi yang mendistribusikan, memproduksi, dan menerbitkan barang di berbagai pasar, termasuk penerbitan, radio, internet, periklanan, film dan teater, televisi, musik, dan penerbitan, dikenal sebagai bisnis hiburan, atau hiburan. Segupta dan Mukherji mengklaim bahwa sektor hiburan adalah sektor kreatif yang merespons permintaan pelanggan dan kemajuan teknologi, sehingga menimbulkan persaingan sengit bagi para pengusaha di sektor tersebut. Selain itu, industri hiburan di Indonesia juga berkembang pesat, sehingga memberikan sejumlah peluang bagi generasi muda yang memiliki keterampilan.

Anak-anak yang memiliki kemampuan akting, menyanyi, menari, dan seni lainnya sangat disukai masyarakat umum dan berpeluang menjadi terkenal dan kaya raya. Akan tetapi, industri hiburan sering kali memiliki sisi gelap yang melibatkan eksploitasi anak-anak. Anak-anak dipekerjakan untuk menghibur masyarakat baik di belakang layar maupun di atas panggung terkadang hal ini melibatkan jam kerja yang panjang dan tentunya menyita jam istirahat. Selain merampas masa anak-anak, pekerjaan ini juga dapat merugikan kesejahteraan sosial, emosional, dan fisik mereka. Karena hak-hak yang seharusnya dimiliki anak juga terabaikan, pekerja anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Kondisi ini menempatkan pekerja anak pada kondisi yang menghendaki perlindungan khusus dan perlakuan serius oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan kelompok berkepentingan, dan juga pemerintah sebagai pemegang kewenangan. Kategori ini mencakup hak atas pendidikan, bermain, layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

Pekerja anak tidak hanya melanggar hak anak, namun, juga berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pekerjaan ini dapat berdampak pada kemampuan anak guna menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Anak-anak kecil yang bekerja, yang biasanya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dan berpendidikan rendah, pada kenyataannya akan terus berada dalam kemiskinan karena anak-anak yang mencari pundi-pundi uang ini tumbuh menjadi orang dewasa yang melakukan pekerjaan kasar dengan upah yang tidak seberapa.

Di Indonesia sendiri pengaturan pekerja anak diatur dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melarang pengusaha mempekerjakan anak.¹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia kurang dari delapan belas (18) tahun. Tingginya tingkat minat anak-anak harus diperhitungkan, dan pendidikan mereka harus mendapat perhatian khusus. Perlindungan hukum khusus diperlukan bagi pekerja, termasuk mereka yang bekerja atau mencari pekerjaan sambil melakukan aktivitas lain. Hal ini terutama berlaku bagi anak di bawah umur yang memiliki pengalaman kerja.² Akan tetapi, pada praktiknya masih banyak kasus eksploitasi anak, Ketika anak-anak digunakan sebagai komoditas untuk dieksploitasi, anak-anaklah yang menderita, sedangkan pelaku kejahatan mendapatkan keuntungan. Anak-anak korban eksploitasi perlu diberikan perhatian ekstra karena mereka masih mempunyai masa depan yang panjang, sama seperti anak-anak lainnya. Dengan demikian, hak-hak anak harus selalu ditegakkan, kendatipun bagaimana hak-hak tersebut dilindungi akan bergantung pada seberapa besar penderitaan atau kerugian yang dialami oleh para korban eksploitasi pekerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang pekerja anak berdasarkan *undang-undang No. 13 Tahun 2003*, dan menganalisis implementasi dan peran lembaga terkait dalam mengupayakan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di industri hiburan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Normatif Yuridis sebagai pendekatannya. Metode ini merupakan jenis penelitian hukum yang menekankan analisis berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan relevan terkait masalah hukum yang diteliti. Dalam pengumpulan data, penulis memanfaatkan sumber data sekunder dan primer. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu metode yang mempelajari teori-teori dari beberapa sumber seperti jurnal, buku, atau penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik ini. Selain itu, metode penelitian deskriptif juga

¹ Soegiarto, A., & Irwansyah, I. (2023). *Komodifikasi dalam Tayangan Anak di YouTube: Studi Kasus Ryan's World dan Super Duper Ziyen*. Scriptura, 13(2), hlm. 104.

² Ibid.

diterapkan, dimana data dikumpulkan dari berbagai sumber informasi seperti jurnal, artikel, dan putusan pengadilan yang faktual. Data ini dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif, yang memiliki arti kesimpulan ditarik dari hal yang umum menjadi hal yang lebih spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Pekerja Anak Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003

Sekecil apapun peran pekerja anak, keberadaan dan posisinya tetap harus mendapat perhatian dan perlindungan. Upaya memberikan perlindungan terhadap pekerja anak dalam suatu hubungan kerja merupakan pelaksanaan pemerintah harus memperhatikan perlindungan kerja dan memperhatikan keselamatan pekerja khususnya pekerja anak agar dapat berkembang dengan baik karena jika ingin mendorong terpeliharanya kemampuan dan dedikasi, maka harus menjaga kesehatan tenaga kerja dan menjamin keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan. Penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja di suatu perusahaan atau tempat kerja dilakukan dengan bergandengan oleh direktur utama atau pimpinan perusahaan dan semua pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Dalam pengimplementasiannya, petugas keselamatan dan kesehatan kerja dapat membantu seorang direktur atau pimpinan atau jajaran pengurus perusahaan yang bersangkutan.³

Anak-anak sebagai pekerja dalam proses produksi mempunyai kemampuan yang terbatas, berbeda halnya dengan pekerja dewasa. Oleh karena itu dalam melaksanakan pekerjaannya memerlukan perlindungan baik dari pemerintah maupun pengusaha. Melalui peningkatan terhadap perlindungan fisik dan teknis, pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta sosial dan ekonomi melalui norma-norma yang berlaku di lingkungan tempat kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan ketenagakerjaan.⁴ Perlindungan ketenagakerjaan meliputi banyak aspek, diantaranya ada perlindungan tentang keselamatan, perlindungan tentang kesehatan, terpeliharanya moral kerja dan prosedur yang sesuai dengan martabat,

³ Wiwi Yuhaeni, (2020). *The Legal Protection Towards Child Labour In An Attempt To Improve Their Work Safety and Health*. International Journal of Acience and Society Vol. 2, No. 3. Hlm. 190

⁴ I Gusti Ketut Riza Aditya, dkk., (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jurnal Kertha Semaya Vol. 7, No. 2. Hlm. 8

moral, dan agama, terkhususnya untuk perlindungan terhadap pekerja anak karena pekerja anak secara fisik dan mental berbeda dengan pekerja dewasa. Membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan yang dimuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970, dapat dikatakan bahwa keselamatan kerja mempunyai cakupan yang luas termasuk keamanan kerja yang bertujuan untuk menjamin terciptanya ketenangan kerja. Ketentuan tersebut merupakan salah satu kewajiban pengusaha untuk menjamin keselamatan pekerja. Sesuai dengan pasal 1602-w KUH Perdata yang menyatakan: “Pengusaha wajib menata dan memelihara ruangan, perkakas atau alat-alat serta memberikan pembinaan sampai terlindunginya pekerja dari bahaya terhadap jiwa, kehormatan, dan harta benda”.⁵

Pekerja anak dan pekerja dewasa bekerja sama dalam ruang tertutup/terbuka, sejauh ini tidak ada masalah artinya tidak ada kasus yang mengarah pada tindakan tercela seperti pekerja dewasa melakukan tindakan seksualitas terhadap anak. Setiap orang dilarang untuk mempekerjakan atau mengikutsertakan anak dalam pekerjaan yang dinilai buruk, hal tersebut dimuat dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003. Cakupan pekerjaan yang dimaksud adalah bentuk perbudakan, dan tindakan menyukai, menyediakan, memanfaatkan, atau menawarkan anak untuk hal prostitusi, produksi dan pertunjukan pornografi, perjudian, maupun kegiatan yang merangkap minuman keras, narkotika, ataupun zat adiktif apapun, yang dapat berakibat membahayakan kesehatan, keselamatan, serta moral anak.

Pengusaha juga dilarang untuk mempekerjakan anak, hal selaras dengan Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003. Akan tetapi, larangan tersebut tidak diberlakukan untuk anak berusia antara 13 dan 15 tahun yang melakukan sebuah pekerjaan ringan, sepanjang pekerjaan tersebut tidak mengganggu perkembangan atau kesehatan mental, fisik, atau sosial, hal itu dimuat dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 185 menetapkan sanksi pidana orang yang telah melanggar ketentuan pada Pasal 68, dengan ancaman hukuman penjara satu hingga empat tahun dan/atau denda sebesar Rp 100.000.000 hingga Rp 400.000.000. Rumusan larangan eksploitasi, termasuk larangan mempekerjakan atau mengikutsertakan anak dalam pekerjaan yang terburu-buru atau berat

⁵ Yunita Ajeng Fadila, Khayatudin, (2022). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Pekerja Anak di Indonesia dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Yustitiabelen Vol. 8, No. 2. Hlm. 150

yang bisa mempengaruhi kemampuan tumbuh dan perkembangan anak, diatur dalam Pasal 74. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 183, yang mengancam dengan hukuman penjara dua hingga lima tahun dan/atau denda antara Rp 200.000.000 hingga Rp 500.000.000. Pasal 75 juga menetapkan perlindungan bagi anak-anak yang bekerja di luar hubungan kerja, mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah cepat untuk melakukan pencegahan. Selain itu, upaya pencegahan ini dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang berkaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan.⁶

Jadi dengan kata lain, berdasarkan UU Ketenagakerjaan, hak-hak anak dilindungi sepenuhnya oleh negara. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menangani masalah bagi anak-anak yang bekerja di luar hubungan kerja melalui upaya yang terstruktur dengan baik dan berkoordinasi dengan pihak-pihak bersangkutan. Salah satu contoh pekerjaan anak yang bekerja di luar rumah antara lain penyemir sepatu, penjual koran, dan berbagai pekerja lainnya. Yang dimaksud dalam hubungan kerja yaitu ikatan antara pemberi kerja dan pekerja dengan berdasar pada kontrak kerja yang memuat unsur-unsur pekerjaan, arahan dan penghasilan.⁷

Adapun faktor-faktor yang memaksa anak dibawah umur untuk bekerja antara lain: 1) kondisi ekonomi yang buruk yang memaksa anak untuk bekerja; 2) rendahnya tingkat pendidikan orang tua, yang berkontribusi terhadap pekerja anak; 3) keadaan keluarga, seperti keluarga yang berantakan atau hidup dengan orang tua tunggal, yang juga berdampak pada keinginan anak untuk bekerja.

B. Implementasi dan Peran Lembaga Terkait dalam Mengupayakan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Industri Hiburan.

Regulasi terkait tenaga kerja di Indonesia sudah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih spesifik. Dalam pasal 1 ayat (26) telah dikatakan bahwasanya yang dimaksud anak merupakan setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

⁶ Ridwan Arifin, Rodiyah, Aprilia Putri Adiningsih, (2020). *Child Labour Protection Based on Indonesian Manpower Act and Human Rights Principle*. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 9, No. 2. Hlm. 263

⁷ I Made Hendra Gunawan, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Berkaitan Dengan Adanya Non-Competition Clause dalam Sebuah Perjanjian Kerja*. Jurnal Kertha Semaya Vol. 4, No. 1. Hlm. 87

Akan tetapi, tidak jarang ditemukan bahwa pekerja anak yang bekerja dibawah industri hiburan, masih dibawah umur, yakni dibawah delapan belas tahun. Lalu, di dalam undang-undang tersebut telah diatur pula mengenai bagaimana regulasi yang berjalan terhadap pekerja anak di Indonesia. Selanjutnya, di dalam pasal 68 terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa pengusaha tidak diperbolehkan untuk mempekerjakan anak-anak, jika dihubungkan dengan pasal 1 ayat (26) sebelumnya, berarti pengusaha tidak boleh mempekerjakan orang dibawah usia delapan belas tahun.

Kendatipun Pasal 69 memperluas topik ini dengan menyatakan bahwa anak di bawah umur antara 13 hingga 15 tahun dikecualikan dari aturan ini jika pekerjaan yang mereka lakukan ringan dan tidak menghalangi kemampuan mereka untuk tumbuh dan berkembang atau kemampuan mereka untuk menjaga kesehatan tubuh, kesehatan mental, atau sosial. Pasal ini menjelaskan dengan cukup jelas mengenai pembebasan pekerja anak. Menurut Iman Jauhari (dalam Malik et al., 2024), amandemen kedua UUD 1945 menjadikan hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 B Ayat (2). Oleh karena itu, anak-anak dianggap sebagai generasi penerus bangsa.

Menurut Arviani dkk (2022), organisasi yang bergerak di bidang konten kreatif atau hiburan, seperti film, sinetron, periklanan, dan disiplin seni lainnya, termasuk dalam industri hiburan. Selain itu industri hiburan adalah sektor kreatif yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan konsumen, sehingga menciptakan persaingan yang intens bagi para pelaku bisnis di bidang ini. Tidak jarang kita melihat baik itu melalui media televisi ataupun sosial media yang memiliki program dengan *talent* anak kecil. Anak-anak ini masih dalam pengawasan orang tua mereka, dengan begitu, apabila terjadi hal-hal yang dianggap melanggar hak-hak dari anak tersebut, ada dua yang dapat dipermasalahkan dalam kasus ini, apakah regulasi yang kurang efektif atautkah peran orang tua yang lalai dalam menjaga anak-anak dari pekerjaan yang diluar seharusnya mereka lakukan.

Sebelum melangkah jauh ke dalam perilaku “eksploitasi”, perlu kita ketahui bahwasanya berdasarkan data yang ada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Sholihah, menyatakan bahwa Indonesia masih berhadapan dengan masalah

pekerja anak, dengan sekitar 1,14 juta anak yang terlibat dalam kondisi ini.⁸ Lalu, perhatikan terlebih dahulu apakah *talent* anak-anak yang digunakan dalam dunia hiburan sudah mematuhi regulasi yang ada atau belum. Seringkali yang terjadi di dalam dunia hiburan adalah bagaimana seorang anak yang sedang menyalurkan bakat tampilnya di depan media, hal tersebut tidak ada salahnya, akan tetapi apabila hal tersebut sudah melangkah ke arah lebih jauh sehingga anak tersebut dituntut untuk selalu tampil dan melewati batas jam kerja yang sudah ditentukan di dalam UU Ketenagakerjaan, maka ada dua yang harus diperhatikan disana, perusahaan yang mempekerjakan anak dan orang tua dari anak itu.

Di dalam pasal 69 UU Ketenagakerjaan dalam pasal yang membahas mengenai pengecualian, ayat (2) huruf a disebutkan bahwa izin orang tua perlu didapatkan sebelum si anak tersebut dapat bekerja. Dengan adanya hal ini, berarti segala hal yang terjadi dalam pekerjaan yang akan dilakukan oleh sang anak, harus melalui persetujuan orang tua terlebih dahulu. Dan perusahaan tidak bisa melakukan apa yang tidak tercantum dalam persetujuan, karena nantinya akan melanggar kesepakatan di awal. Setiap lembaga atau perusahaan yang ingin mempekerjakan seorang anak berarti harus tunduk pada segala konsekuensi dan pengecualian yang sudah diatur di dalam UU Ketenagakerjaan. Begitupun peran penting orang tua dalam menyeleksi dan memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh sang anak tidak melanggar apa yang sudah tercantum dalam peraturan tertulis.

Membicarakan mengenai implementasi dari pihak-pihak terkait yang memiliki wewenang untuk mencegah dan melindungi anak dari pekerjaan yang melanggar hak-hak mereka, selain orang tua dan perusahaan yang mempekerjakan, perlu diperhatikan bagaimana perilaku lembaga terkait sekaligus pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Langkah-langkah seperti peningkatan keterlibatan masyarakat, pengalihan fokus pada pendidikan usia dini, pemberian penyuluhan bagi tenaga kerja anak,, bantuan untuk keluarga miskin agar alasan ekonomi tidak memaksa kanak-kanak bekerja, pemeriksaan serta pemberian sanksi kepada perusahaan yang terbukti mengeksploitasi anak, dan sosialisasi

⁸ Mecca Yumna (2024) KPAI: 1,14 juta anak masih dalam situasi pekerja anak. <https://www.antaraneews.com/berita/4148763/kpai-114-juta-anak-masih-dalam-situasi-pekerja-anak> diakses pada 15 Juni 2024.

norma-norma kerja anak kepada berbagai pihak.⁹ Pemerintah pusat juga telah mengambil langkah-langkah lain, yang tercermin dalam tiga Keputusan Presiden (Keppres) berikut ini:

1. KEPPRES No. 12/2001 mengenai Komite Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak;
2. KEPPRES No. 59/2002 mengenai Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak;
3. KEPPRES No. 87/2002 mengenai Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak.¹⁰

Kemudian fungsi pemerintah dalam menangani masalah eksploitasi anak akan sangat substansial dengan adanya kontribusi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI adalah komisi independen yang tidak berada di bawah kendali eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.¹¹ Kendatipun, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah inisiatif untuk menurunkan jumlah pekerja anak. Beberapa program yang termasuk dalam upaya ini antara lain;

1. Program Penghapusan Pekerja Anak (IPEC) bertujuan meningkatkan kemampuan negara anggota yang telah meratifikasi Konvensi ILO 138 dan 182 dalam menangani serta mengurangi pekerja anak.
2. Program Penarikan Pekerja Anak bermaksud untuk mengurangi jumlah anak pekerja dari Rumah Tangga Miskin (RTM) yang putus sekolah dengan menarik mereka dari tempat kerja dan mendampingi mereka di panti asuhan untuk menstimulasi serta mempersiapkan mereka kembali untuk mengenyam pendidikan.
3. Program Pengurangan Pekerja Anak melalui Keterampilan Kejuruan serta Kecakapan Hidup bertujuan mengurangi jumlah anak pekerja dengan memberikan pelatihan keterampilan kejuruan dan kecakapan hidup bagi anak-anak yang putus sekolah.

⁹ Agus Riwanto, dkk (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 3, No. 11, hlm 1478.

¹⁰ Ibid

¹¹ Garry Garry, Beniharmoni Harefa (2023). Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial. *Jurnal USM Law Review* Vol 7 No 1, hlm 149.

4. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) berfungsi sebagai panduan untuk menghapuskan segala bentuk pekerjaan tidak pantas bagi anak-anak, yang diimplementasikan melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002.
5. Upaya Pencegahan dan Penghapusan Pekerja Anak dari BPTA melibatkan bermacam program, termasuk Program Zona/kawasan Bebas, untuk mencegah dan menghapus pekerja anak dari segala bentuk pekerjaan tidak pantas bagi anak.

Oleh karena itu, diharapkan kerjasama yang berirama agar kedepannya tindakan yang menyangkut pautkan anak-anak dapat diperhatikan dengan seksama. Anak-anak merupakan kekayaan berharga untuk masa depan sebuah negara, karena di tangan merekalah terletak potensi untuk menciptakan perubahan positif dan kemajuan. Pentingnya anak-anak tidak hanya terletak pada peran mereka sebagai penerus generasi, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk berinovasi dan membawa perspektif baru dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, anak-anak merupakan kelompok rentan yang patut untuk dilindungi, maka dari itu dengan adanya regulasi terkait yang mengatur sedemikian rupa mengenai pekerja anak agar kedepannya tidak ada hak anak-anak yang dilanggar

KESIMPULAN

Anak-anak merupakan kekayaan sebuah bangsa dikarenakan merekalah menjadi bagian dari generasi muda yang memiliki peran kunci dalam kemajuan suatu negara. Anak-anak sebagai pekerja dalam proses produksi mempunyai kemampuan yang terbatas, berbeda halnya dengan pekerja dewasa. Pengakuan hak asasi manusia dan penerapan peraturan lingkungan kerja yang berlaku untuk mengatur perlindungan fisik, teknis, sosial, dan ekonomi dapat meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan. Perlindungan ini mencakup beberapa hal, termasuk kesehatan dan keselamatan, menjunjung tinggi standar moral di tempat kerja, dan memperlakukan orang dengan hormat terhadap martabat kemanusiaan dan keyakinan agamanya. Hal ini juga mencakup perlindungan khusus terhadap pekerja anak karena perbedaan fisik dan mental mereka dengan pekerja dewasa.

Tak jarang kita melihat baik itu melalui media televisi ataupun sosial media yang memiliki program dengan talent anak kecil. Anak-anak ini masih dalam pengawasan orang tua mereka, dengan begitu, apabila terjadi hal-hal yang dianggap melangkahi hak-hak dari

anak tersebut, ada dua yang dapat dipermasalahkan dalam kasus ini, apakah regulasi yang kurang efektif ataukah peran orang tua yang khilaf dalam menjaga anak-anak dari pekerjaan yang diluar seharusnya mereka lakukan. Sebelum melangkah jauh ke dalam perilaku “eksploitasi”, menurut data yang tersedia, Indonesia masih menghadapi tantangan terkait pekerja anak, dengan sekitar 1,14 juta anak berpartisipasi dalam situasi tersebut. Seringkali yang terjadi berada di dalam dunia hiburan adalah bagaimana seorang anak yang sedang menyalurkan bakat tampilnya di depan media, hal tersebut tidak ada salahnya, akan tetapi apabila hal tersebut sudah melangkah ke arah lebih jauh sehingga anak tersebut dituntut untuk selalu tampil dan melewati batas jam kerja yang sudah ditentukan di dalam UU Ketenagakerjaan, maka ada dua yang harus diperhatikan disana, yaitu perusahaan yang mempekerjakan anak dan orang tua dari anak itu.

Langkah-langkah untuk menanggulangi masalah tersebut seperti peningkatan keterlibatan masyarakat, pengalihan fokus pada pendidikan anak, pemberian pelatihan bagi pekerja anak, mensubsidikan untuk keluarga kurang mampu agar alasan ekonomi tidak lagi memaksa anak-anak untuk bekerja, pemeriksaan serta pemberian sanksi kepada perusahaan yang terbukti mengeksploitasi anak, dan sosialisasi norma-norma kerja anak kepada berbagai pihak. Langkah-langkah lain yang diambil oleh pemerintah pusat tercermin dalam tiga Keputusan Presiden berikut: Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2001; Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002; Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2002. Selain itu, peran pemerintah dalam menangani masalah eksploitasi terhadap anak juga penting, dengan Konvensi Hak Anak (KPAI) memiliki peran yang signifikan dalam hal ini

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ridwan, Rodiyah, & Adiningsih, A. P. (2020). Child Labour Protection Based on Indonesian Manpower Acts and Human Rights Principle. *Jurnal Magister Hukum* 9, No. 2: 253-268.
- Bahtari, M. F., Mutimatun, N. A., & SH, M. (2019). Perlindungan Pekerja Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap UU KetenagaKerjaan No. 13 Tahun 2003) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Fadila, Khayatudin, & Ajeng, Y. (2022). Tinjauan Yuridi Perlindungan Pekerja Anak di Indonesia dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. *Yustitiabelen* 8, No. 2: 143-166.

- Garry, G., & Harefa, B. (2024). Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial Public Child Protection Law Figures as Victims of Exploitation on Social Media. *Jurnal USM Law Review* Vol, 7(1).
- Gunawan, Hendra, I. M., & Jayantiari, I. G. A. M. R. (2016). “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Berkaitan Dengan Adanya Non-Competition Clause dalam Sebuah Perjanjian Kerja. *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 1: 81-90.
- Riza, I. G. K., Sarjana, I. M., Aditya & Udiana, I. M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 2: 2-14.
- Sasono, S., Riwanto, A., Maharani, A. E. P., Suryanegara, A., & Firaussy, A. G. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(11).
- Yuhaeni, Wiwi. (2020). The Legal Protection Towards Child Labour In An Attempt To Improve Their Work Safety and Health. *International Journal of Acience and Society. Onternational Journal of Science and Society* 2, No. 1: 188-203.
- Yuniarto, G. B. D. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Pengertian Anak Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda, diakses pada 1 juni 2024. <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=4029&bid=7496>
- Wahyuni, W. (2023d, May 8). Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum. [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/). diakses pada 2 juni 2024 [.https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/](https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/)